



Kementerian PPN/
Bappenas

Pedoman Teknis Penyusunan *Voluntary Local Review (VLR) SDGs* Untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia



Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2024



Kementerian PPN/
Bappenas

Pedoman Teknis

Penyusunan *Voluntary Local Review (VLR)*
SDGs Untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota
di Indonesia



Pedoman Teknis

Penyusunan *Voluntary Local Review (VLR) SDGs* Untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia



**Kementerian PPN/
Bappenas**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penyelaras Akhir : Vivi Yulaswati, Yanuar Nugroho

Reviewer : Pungkas Bahjuri Ali, Yanuar Nugroho

Tim Penyusun : Rachman Kurniawan, Sanjoyo, Setyo Budiantoro, Gantjang Amanulah, Winastwan Gora, Zulazmi, Marvel Josef Petrus Ledo, Khairanis Rahmanda Irina, Adhika Dwita Dibyareswati, Chiquita Abidin, Fitriyani Yasir, Alimatul Rahim, Anggita Sulisetiasih, Danya Wulandari Joedo, Adenira Hargianintya, Septia Anisa.

Tim Pendukung : Eneng Fathonah, Fredrick Ellia Gugkang, Yoakim Asy, Boby Rantow Payu, Anita Wahyuni, Abdul Halim, Hapsari Octaviani.

Layout/Desain : Ongky Arisandi

Diterbitkan Oleh:

Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Isi dan materi yang ada pada buku ini dapat diproduksi dan disebarluaskan dengan tidak mengurangi isi dan arti dari dokumen ini. Diperbolehkan untuk mengutip isi buku ini dengan menyebutkan sumbernya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk terus berupaya melaksanakan program pembangunan untuk mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia yang telah memasuki *Decade of Action* sehingga diperlukan upaya percepatan pencapaian target oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun nonpemerintah.



Sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian SDGs di daerah, Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa strategi dan kebijakan, termasuk di antaranya dengan mendorong pelaksanaan *Voluntary Local Review* atau VLR yang melengkapi Laporan Tahunan SDGs di tingkat daerah. Dalam konteks ini, Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan GIZ SDGs/SSTC, menghadirkan buku panduan penyusunan laporan VLR untuk tingkat provinsi, kota, atau kabupaten di Indonesia.

Buku panduan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan praktis bagi provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia dalam menyusun VLR. Buku ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan capian SDGs termasuk dengan menyusun VLR di tingkat daerah.

Melalui buku panduan ini, kami berharap seluruh pihak, terutama pemerintah daerah, dapat memanfaatkan panduan ini secara maksimal dan mengimplementasikannya dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan berkelanjutan di daerah.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan dukungan semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku panduan ini. Mari bersama-sama berupaya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, sesuai dengan visi kita untuk menjadi negara maju dan berkelanjutan di tahun 2045.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Mei 2024



Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, MS, Ph.D.

Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan,
selaku Kepala Sekretariat Nasional TPB/SDGs

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	III
Daftar Gambar	V
Daftar Singkatan	VI

PENDAHULUAN	1
--------------------	----------

1	
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Sasaran dan Tujuan Panduan	3
1.3. Sekilas Tentang VNR dan VLR SDGs	4
1.4. Mengenal Lebih Jauh Tentang VLR SDGs	4
1.5. Perkembangan VLR SDGs	6
1.6. Prinsip Penyusunan VLR SDGs	6
1.7. Manfaat Pelaksanaan VLR SDGs Bagi Pemangku Kepentingan Pemerintah	7
1.8. Manfaat Pelaksanaan VLR SDGs Bagi Pemangku Kepentingan Nonpemerintah	8
1.9. Peran VLR dalam Siklus Pelaksanaan SDGs di Tingkat Daerah	9

PROSES PENYUSUNAN VLR SDGs DI DAERAH	13
---	-----------

2	
2.1. Para Pihak yang Harus Terlibat dalam Penyusunan VLR SDGs	15
2.2. Tahapan Penyusunan VLR SDGs	16

3

3.1. Format dan Sistematika Laporan VLR SDGs	21
<i>Opening Statement</i>	21
<i>Highlights (main messages)</i>	22
<i>Introduction</i>	23
<i>Methodology and Process for Preparation of The Review</i>	23
<i>Policy and Enabling Environment</i>	24
<i>Progress on Goals and Targets</i>	25
<i>Means of Implementation</i>	26
<i>Conclusion and Next Steps</i>	27
<i>Annexes</i>	27

4

4.1. Diseminasi Laporan VLR SDGs	31
4.2. Tindak Lanjut VLR SDGs	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Siklus Pelaksanaan SDGs di Tingkat Daerah	11
Gambar 2. Tahapan Penyusunan VLR SDGs	18
Gambar 3. Contoh Tampilan Infografis di Laporan VLR Provinsi DKI Jakarta	22

DAFTAR SINGKATAN

BAPPENAS

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BAPPEDA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

CSO

Civil Society Organization

GIZ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

HLPF

High-level Political Forum on Sustainable Development

IGES

Institute of Global Environmental Strategies

LSM

Lembaga Swadaya Masyarakat

NGO

Non-Governmental Organization

OPD

Organisasi Perangkat Daerah

PBB

Persatuan Bangsa Bangsa

RAD

Rencana Aksi Daerah

RAN

Rencana Aksi Nasional

RPJMN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

SDGs

Sustainable Development Goals

TPB

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

UCLG ASPAC

United Cities and Local Government Asia Pacific

UN

United Nations

UNESCAP

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

VLR

Voluntary Local Review

VNR

Voluntary National Review

VSR

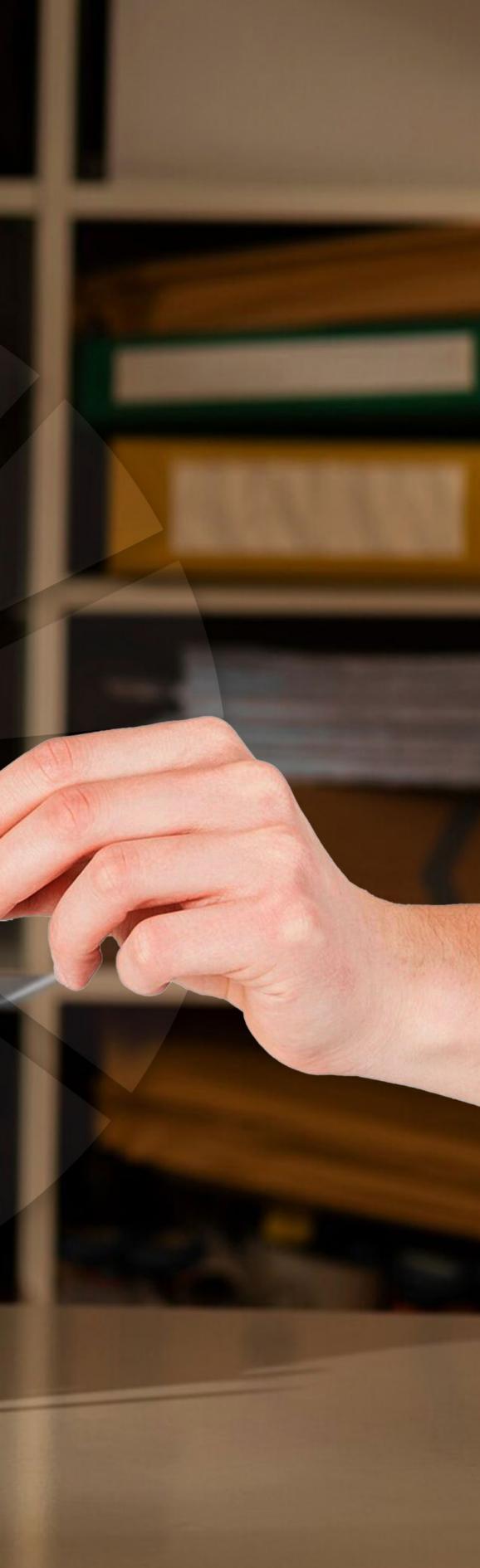
Voluntary Sub-national Review



1

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG,
TUJUAN PANDUAN DAN
MENGENAL VLR SDGS,
SEJARAH, PERKEMBANGAN
DAN PELAKSANAANNYA
DI INDONESIA SERTA
MANFAATNYA BAGI DAERAH.



1.1. Latar Belakang

Sejak Tahun 2018 dalam *High Level Political Forum* (HLPF), sebuah forum yang diselenggarakan oleh kantor pusat PBB, beberapa daerah telah mulai melaporkan VLR SDGs secara sukarela. Dan pada tahun-tahun berikutnya semakin banyak pemerintah daerah mempublikasikan laporan VLR SDGs mereka.

Sejak diadopsinya Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2015, banyak pembelajaran yang telah diperoleh oleh negara, pemangku kepentingan pemerintah dan nonpemerintah dalam mendukung upaya pelaksanaan pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Sejak Tahun 2018 dalam *High Level Political Forum* (HLPF), sebuah forum yang diselenggarakan oleh kantor pusat PBB, beberapa kota telah memulai untuk melaporkan VLR SDGs secara sukarela dan pada tahun-tahun berikutnya semakin banyak pemerintah daerah mempublikasikan laporan VLR SDGs mereka. Termasuk diantaranya pemerintah daerah di Indonesia. Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dan Kota Surabaya juga telah mengembangkan dan melaporkan VLR SDGs pada Tahun 2021. Inisiatif ini perlu disebarluaskan kepada daerah-daerah lain di Indonesia agar capaian kemajuan dan pembelajaran dari pelaksanaan SDGs dapat disebarluaskan secara lokal, nasional, regional dan internasional untuk menginspirasi daerah lain dan menjadi pembelajaran, sebagai upaya untuk mengakselerasi pencapaian SDGs.

1.2. Sasaran dan Tujuan Panduan

1.2.1. Sasaran

Buku panduan ini disediakan bagi pemerintah daerah dan Sekretariat SDGs tingkat daerah (provinsi, kabupaten dan kota), serta pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam penyusunan VLR SDGs.

1.2.2. Tujuan

Buku panduan ini disediakan untuk meningkatkan pemahaman pembaca tentang:

1. Apa itu VLR SDGs
2. Sejarah dan perkembangannya
3. Berbagai manfaat yang akan diperoleh bagi pihak pemerintah dan nonpemerintah jika menyusun VLR SDGs

4. Peran VLR SDGs dalam siklus pelaksanaan SDGs
5. Metode dan tahapan pelaksanaan VLR SDGs
6. Struktur dan isi laporan VLR SDGs
7. Diseminasi dan tindak lanjut VLR SDGs

1.3. Sekilas Tentang VNR dan VLR SDGs

VNR dan VLR adalah sebagai bagian dari mekanisme tinjauan dan tindak lanjut Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Negara-negara anggota PBB didorong untuk melakukan tinjauan kemajuan secara sukarela, teratur dan inklusif di tingkat nasional dan subnasional.

Di tingkat nasional, mekanisme tinjauan pencapaian SDGs ini disebut dengan VNR (*Voluntary National Review*) yang disusun secara inklusif oleh pemerintah pusat bersama dengan pihak non pemerintah. VNR SDGs bertujuan untuk memfasilitasi berbagi pengalaman, termasuk keberhasilan, tantangan, dan pelajaran yang dipetik, dengan maksud untuk mempercepat implementasi Agenda 2030.

VLR SDGs adalah proses di mana pemerintah daerah/provinsi, kota, dan kabupaten, secara sukarela menyusun dan melaporkan kemajuan SDGs internasional sekaligus promosi potensi dan keunggulan daerah untuk membuka peluang kemitraan dengan berbagai pihak.

VNR SDGs juga berusaha untuk memperkuat kebijakan dan institusi pemerintah dan memobilisasi dukungan dan kemitraan *multi-stakeholder* untuk implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Di tingkat daerah, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota didorong untuk melakukan mekanisme tinjauan dan tindak lanjut dalam bentuk VLR (*Voluntary Local Review*) SDGs yang disusun oleh pemerintah daerah bersama dengan pemangku nonpemerintah.

1.4. Mengenal Lebih Jauh Tentang VLR SDGs

VLR SDGs adalah proses di mana pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten, secara sukarela menyusun dan melaporkan kemajuan pencapaian SDGs ke UN/PBB di tingkat internasional[1]. VLR SDGs merupakan salah satu instrumen tinjauan

Laporan capaian tahunan SDGs tingkat provinsi, kabupaten atau kota harus menyampaikan semua tujuan dari SDGs, sedangkan di dalam VLR SDGs, tujuan tertentu yang sukses dicapai dan menjadi keunggulan serta prioritas daerah saja yang dapat disampaikan.

terhadap capaian SDGs yang digunakan oleh PBB. Inisiatif VLR SDGs mulai dikenal secara internasional setelah diperkenalkan pada pertemuan Habitat III di Quito, Ekuador pada tahun 2016, dan terus berkembang di berbagai negara termasuk Indonesia. Laporan VLR SDGs yang telah disusun kemudian dapat digunakan sebagai sumber inspirasi dan

referensi bagi daerah lain dalam upaya untuk mencapai SDGs secara lebih efektif.

Dalam VLR SDGs, pemerintah daerah menyajikan informasi tentang kesuksesan dan keunggulan daerah dalam mencapai target dan indikator SDGs dan mengatasi tantangan di tingkat lokal atau daerah serta memperlihatkan upaya mereka dalam mengatasi tantangan dan kesenjangan pembangunan berkelanjutan yang ada di daerah mereka. Laporan VLR SDGs juga merupakan sarana dan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk berbagi kemajuan, pengalaman, dan praktik baik pelaksanaan SDGs di tingkat daerah dengan daerah lain di seluruh dunia. VLR juga sebagai langkah diseminasi atau penyebaran capaian/ kemajuan dan praktik baik pelaksanaan SDGs pada Tujuan tertentu di tingkat Internasional, termasuk untuk membuka kesempatan kemitraan dengan berbagai pihak

Penyusunan VLR SDGs merupakan bagian dari siklus pelaksanaan SDGs yaitu pada bagian pelaporan. Siklus SDGs terdiri dari proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan SDGs. **Dengan demikian bagi Indonesia, laporan VLR menjadi pelengkap dari laporan SDGs tahunan yang disusun daerah untuk melaporkan capaian setiap indikator yang terdapat pada Rencana Aksi Daerah SDGs.**

Perbedaan utama antara isi laporan capaian tahunan SDGs daerah dengan VLR SDGs adalah pada cakupan Tujuan SDGs yang disampaikan serta penggunaan bahasa yang dipergunakan. Laporan capaian tahunan SDGs tingkat provinsi, kabupaten atau kota memuat capaian semua Tujuan, sedangkan di dalam VLR SDGs dimungkinkan dianalisis terhadap Tujuan tertentu. Laporan capaian tahunan SDGs menggunakan Bahasa Indonesia, sedangkan VLR SDGs menggunakan Bahasa Inggris atau 6 (enam) bahasa lain yang diakui oleh PBB karena untuk keperluan publikasi di laman PBB. Untuk VLR SDGs dari Indonesia yang dilaporkan ke UN/PBB diutamakan menggunakan Bahasa Inggris.

1.5. Perkembangan VLR SDGs

Side event (kegiatan sampingan/pendukung) bertema Forum Pemerintah Lokal dan Regional yang diselenggarakan pada kegiatan HLPF (*High Level Political Forum*) PBB di tahun 2018 dan 2019, merupakan terobosan dalam forum global mengenai VLR SDGs. Side events ini menjadi media informasi yang bersumber secara lokal dan media saling bertukar pengetahuan di tingkat lokal maupun global.

Pada tahun 2018, Kota New York dan tiga Kota Jepang lainnya (Kitakyushu, Shimokawa, dan Toyama) menjadi pelopor yang secara resmi meluncurkan VLR SDGs, berikutnya diikuti oleh kota Helsinki dan beberapa kota lainnya. Selanjutnya lebih banyak kota ikut berkumpul pada tahun 2019 untuk menandatangani Deklarasi VLR, yang juga didukung oleh UNHabitat[2].

Pada Tahun 2022 terdapat hampir 100 (seratus) wilayah telah menyusun laporan VLR SDGs sebagai upaya menampilkan capaian SDGs di tingkat lokal[5].

Di Indonesia, kota Surabaya telah menyusun laporan VLR SDGs pada Tahun 2021 yang berfokus pada 9 (sembilan) tujuan SDGs dengan tema “Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan Menuju Komunitas yang Tangguh Pasca Pandemi”[4]. Selain itu Provinsi DKI Jakarta juga telah mengembangkan VLR SDGs pada tahun yang sama yang berfokus pada 4 (empat) Tujuan SDGs dengan tema “Jakarta Kolaborasi Menangani Pandemi COVID-19: Bangkit Menuju Jakarta Tangguh”.

VLR Kota Surabaya menjadi salah satu yang juga menjadi bagian yang dilaporkan pada VNR Indonesia tahun 2021 terkait peran pemerintah daerah. Upaya pelaksanaan VLR SDGs di Indonesia ini patut diapresiasi dan perlu disebarluaskan sehingga dapat dijadikan contoh bagi pemerintah daerah lainnya.

1.6. Prinsip Penyusunan VLR SDGs

Proses penyusunan VLR SDGs harus konsisten serta menggunakan prinsip-prinsip Agenda 2030 atau SDGs [2], sebagai berikut:

1. Memelihara orientasi jangka panjang, mengidentifikasi pencapaian, tantangan, kesenjangan dan faktor penentu keberhasilan dan mendukung negara dan daerah dalam membuat pilihan kebijakan. Hal ini akan membantu memobilisasi sarana implementasi dan kemitraan yang diperlukan, mendukung identifikasi solusi dan praktik terbaik serta mempromosikan koordinasi dan efektivitas sistem pembangunan secara nasional dan internasional.
2. Bersifat terbuka, inklusif, partisipatif dan transparan untuk semua orang dan

- akan mendukung pelaporan oleh semua pemangku kepentingan terkait, baik pemangku pemerintah maupun nonpemerintah.
3. Berpusat pada manusia, peka gender, menghormati hak asasi manusia dan memiliki fokus khusus pada yang paling miskin, paling rentan dan mereka yang tertinggal jauh.
 4. Membangun dan memanfaatkan platform dan proses yang ada, jika ada, menghindari adanya duplikasi dan menanggapi keadaan, kapasitas, kebutuhan dan prioritas nasional maupun daerah. Proses ini akan berkembang dari waktu ke waktu, dengan mempertimbangkan isu-isu yang muncul dan pengembangan metodologi baru, dan akan meminimalkan beban pelaporan administrasi nasional maupun daerah.
 5. Berbasiskan bukti, diinformasikan oleh pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi dari pemangku kepentingan pemerintah dengan menggunakan data yang berkualitas tinggi, dapat diakses, tepat waktu, dapat diandalkan dan dipisahkan berdasarkan pendapatan, jenis kelamin, usia, ras, etnis, status migrasi, disabilitas dan lokasi geografis dan karakteristik lain yang relevan dalam konteks nasional dan daerah.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip SDGs dalam penyusunan VLR diharapkan dapat membantu memastikan bahwa upaya lokal untuk mencapai SDGs dapat terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan.

Upaya penyusunan VLR SDGs di Indonesia ini patut diapresiasi dan perlu disebarluaskan di Indonesia, sehingga VLR SDGs dapat menjadi alat yang berguna untuk memperluas penyebaran pencapaian/kemajuan dan praktik baik pelaksanaan SDGs serta menjadi alat promosi daerah di tingkat lokal hingga global.

1.7. Manfaat Pelaksanaan VLR SDGs Bagi Pemangku Kepentingan Pemerintah

Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dapat memperoleh beberapa manfaat dengan melakukan penyusunan laporan VLR SDGs, antara lain:

1. Alat Promosi Keunggulan dan Kesuksesan Daerah

Dengan menyusun VLR SDGs daerah dapat mempromosikan potensi, keunggulan dan kesuksesan daerah dalam pencapaian SDGs pada Tujuan tertentu yang menjadi fokus atau prioritas daerahnya secara global.

2. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi

Melalui penyusunan VLR SDGs, pemerintah daerah dapat menunjukkan kinerja dan pencapaian SDGs. Hal ini merupakan wujud dari akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah kepada masyarakat.

VLR SDGs adalah peluang bagi daerah untuk berbagi pengalaman pelaksanaan SDGs, mempromosikan potensi daerah dan membuka peluang kemitraan di kancah internasional.

3. Pengembangan rencana pembangunan berkelanjutan

Dengan melakukan VLR SDGs, pemerintah daerah dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan peluang dalam mencapai SDGs di wilayahnya. Hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan rencana pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

4. Peningkatan keterlibatan masyarakat

VLR SDGs dapat menjadi alat untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan berkelanjutan di wilayah mereka. Keterlibatan masyarakat dalam proses VLR SDGs, akan memberi masukan dan perspektif yang lebih luas dari berbagai pemangku kepentingan pemerintah dan nonpemerintah.

5. Peningkatan akses ke sumber daya dan dukungan di tingkat lokal hingga global

VLR SDGs dapat membantu pemerintah daerah dalam memperoleh akses ke sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan untuk mencapai SDGs. Dengan menunjukkan kinerja yang baik dalam implementasi program dan kebijakan yang terkait dengan SDGs, pemerintah daerah dapat menarik perhatian dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga donor dan investor. VLR SDGs adalah peluang bagi daerah untuk berbagi pengalaman pelaksanaan SDGs dan membuka peluang kemitraan di kancah internasional.

1.8. Manfaat Pelaksanaan VLR SDGs Bagi Pemangku Kepentingan Nonpemerintah

Pemangku kepentingan nonpemerintah juga dapat memperoleh manfaat dalam melaksanakan VLR SDGs, antara lain:

1. Peluang partisipasi dan peran aktif dalam pembangunan

Melalui partisipasi dalam pelaksanaan SDGs dan penyusunan VLR SDGs, pemangku kepentingan nonpemerintah dan masyarakat memperoleh kesempatan berperan aktif untuk memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan berkelanjutan di daerah, melaporan kontribusi yang telah dilakukan dan berbagi praktik baik.

2. Kesempatan pengembangan kapasitas dan peningkatan keterampilan

Melalui proses pelaksanaan SDGs dan penyusunan VLR SDGs, pemangku kepentingan nonpemerintah dan masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam mengelola program-program pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta dalam mengembangkan solusi dan program yang lebih efektif untuk mempercepat pencapaian SDGs.

3. Sarana penyampaian aspirasi dan kebutuhan masyarakat

VLR SDGs dapat menjadi sarana bagi pemangku kepentingan nonpemerintah dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka kepada pemerintah daerah. Hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi isu-isu utama yang harus diprioritaskan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

4. Pengakuan dan Penghargaan dalam Pelaksanaan SDGs

VLR SDGs merupakan sarana untuk memberikan pengakuan dan penghargaan dari pemerintah kepada pemangku kepentingan nonpemerintah atas kontribusi dan dukungan mereka terhadap pelaksanaan dan pencapaian SDGs di daerah.

5. Meningkatkan visibilitas dan akuntabilitas

VLR SDGs dapat membantu meningkatkan visibilitas lembaga/organisasi nonpemerintah di kancah global dan meningkatkan akuntabilitas pemangku kepentingan nonpemerintah kepada publik atas keterlibatan mereka dalam pembangunan.

1.9. Peran VLR dalam Siklus Pelaksanaan SDGs di Tingkat Daerah

Pemerintah Indonesia telah merubah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai landasan hukum bagi pemangku kepentingan pemerintah dan nonpemerintah dalam melaksanakan dan mengakselerasi pencapaian target-target SDGs di Indonesia.

Sebagai laporan yang bersifat sukarela, VLR SDGs yang disusun bersama oleh pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan nonpemerintah merujuk pada dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs masing-masing daerah. RAD SDGs sendiri disusun dengan merujuk pada dokumen perencanaan daerah.

VLR SDGs merupakan bagian dari tahapan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam siklus pelaksanaan SDGs daerah, yang penyusunannya merujuk pada laporan capaian tahunan SDGs tingkat daerah.

Siklus pelaksanaan SDGs di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 terdiri atas:

1. Perencanaan

Tahap ini meliputi perencanaan program dan kegiatan SDGs pemerintah bersama pemangku kepentingan nonpemerintah yang tertuang pada RAD SDGs. Mekanisme penyusunan RAD SDGs diatur dalam **Buku Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)** yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 sebagai perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 menjadi landasan hukum baru bagi pemangku kepentingan pemerintah dan nonpemerintah dalam mengakselerasi pencapaian target-target SDGs.

2. Pelaksanaan program dan kegiatan

Tahap ini merupakan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada RAD SDGs baik oleh pemangku kepentingan pemerintah maupun non-pemerintah dengan sumber daya masing-masing atau bersama dalam kerangka kemitraan multi-pihak.

3. Pemantauan dan evaluasi

Tahap ini meliputi monitoring atau pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah diimplementasikan. Pemantauan dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk memastikan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Evaluasi dilakukan pada akhir tahun berjalan untuk menilai apakah program dan kegiatan yang telah diimplementasikan telah mencapai sasaran dan memberikan manfaat yang diharapkan. Proses pendokumentasian hasil pemantauan dan evaluasi harus merujuk pada **Buku Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan SDGs** yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

4. Pelaporan

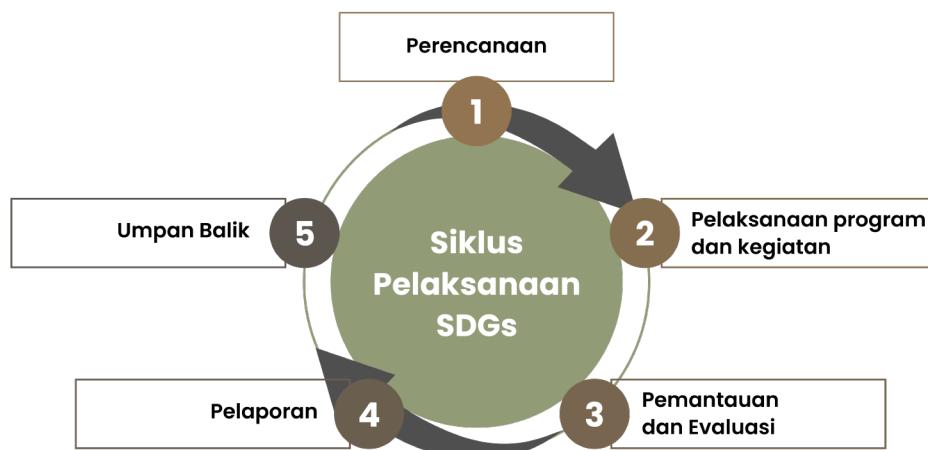
Tahap ini meliputi penyusunan Laporan Capaian Tahunan SDGs yang harus

Dikarenakan VLR SDGs merupakan tindak lanjut untuk penyebarluasan capaian kemajuan pelaksanaan dan pembelajaran SDGs, maka penyusunannya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah jika tahapan-tahapan siklus pelaksanaan SDGs telah dilaksanakan.

dilakukan setiap tahun dan disampaikan kepada pemerintah pusat (Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri). Laporan disusun bersama pemerintah dan nonpemerintah dengan mengacu pada **Buku Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan SDGs** yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Selain menyusun Laporan Capaian Tahunan, daerah juga dapat secara sukarela menyusun VLR SDGs untuk disampaikan ke tingkat global melalui UN/PBB.

5. Umpam Balik

Tahap ini meliputi penyesuaian program dan kegiatan yang telah diimplementasikan agar dapat mencapai target SDGs berdasar hasil umpan balik dan evaluasi. Pemerintah daerah melakukan penyesuaian program dan kegiatan yang telah diimplementasikan secara berkala untuk memastikan pencapaian SDGs.



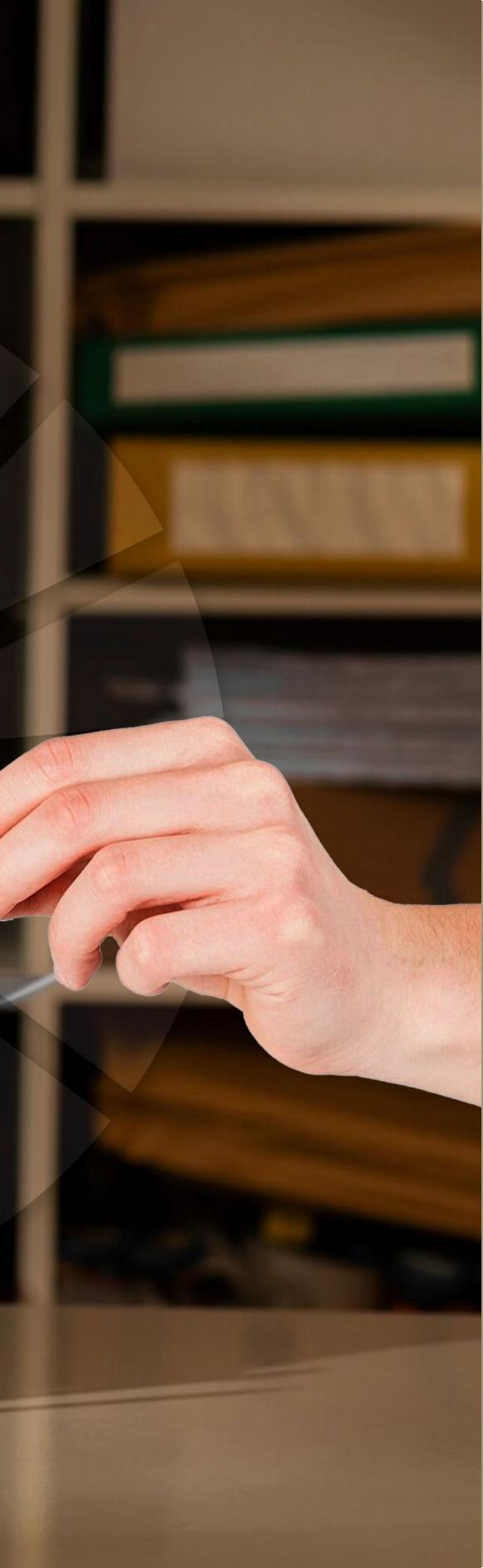
Gambar 1. Siklus Pelaksanaan SDGs di Tingkat Daerah



2

PROSES PENYUSUNAN VLR SDGs DI DAERAH

MEMBAHAS PIHAK YANG
TERLIBAT, WAKTU DAN
TAHAPAN PENYUSUNAN VLR
SDGs DI DAERAH.



2.1. Para Pihak yang Harus Terlibat dalam Penyusunan VLR SDGs

Penyusunan VLR SDGs melibatkan para pihak di tingkat daerah, baik pemangku kepentingan pemerintah maupun nonpemerintah khususnya yang telah terlibat dalam RAD SDGs, antara lain yaitu:

1. Pemerintah Daerah

Kepala daerah tingkat provinsi (Gubernur), kabupaten (Bupati) atau kota (Walikota) merupakan koordinator dan pemimpin orkestrasi para pihak dalam penyusunan VLR SDGs. Agar koordinasi dapat berjalan secara efektif, pemerintah daerah dapat menggunakan struktur koordinasi pelaksanaan SDGs yang sudah terbentuk dan berjalan. Selain kepala daerah, unsur pemerintah daerah yang harus terlibat dalam penyusunan VLR SDGs adalah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebagai pelaksana program dan kegiatan SDGs di tingkat daerah.

2. Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi Kemasyarakatan yang berkontribusi pada pencapaian SDGs di daerah harus dilibatkan. Organisasi kemasyarakatan juga dapat berkontribusi pada penyampaian pembelajaran SDGs melalui praktik baik pelaksanaan SDGs.

3. Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang berkontribusi pada pencapaian SDGs di daerah. Pelaku usaha juga dapat berkontribusi pada penyampaian pembelajaran SDGs melalui praktik baik pelaksanaan SDGs.

4. Filantropi

Filantropi dapat terdiri dari perseorangan atau lembaga yang mendukung pemerintah daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan SDGs serta berkontribusi pada penulisan praktik baik SDGs.

5. Akademisi

Akademisi mendukung penyusunan VLR SDGs baik melalui lembaga SDGs Center yang telah dibentuk maupun melalui pusat-pusat penelitian di perguruan tinggi. Pihak akademisi juga dapat berkontribusi pada penyampaian pembelajaran SDGs melalui penulisan praktik baik pelaksanaan SDGs. Akademisi dapat mendukung dalam penelitian dan analisis atas pencapaian, tantangan serta rekomendasi pelaksanaan SDGs di daerah.

6. Masyarakat dan Kelompok Rentan

Masyarakat dan kelompok rentan harus dilibatkan dalam proses VLR SDGs sebagai pelaku maupun penerima manfaat. Masyarakat termasuk kelompok rentan khususnya yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan SDGs

dapat memberikan masukan pada tahap konsultasi publik, mengidentifikasi masalah dan peluang dalam percepatan pencapaian SDGs di daerah.

Koordinasi dan sinergi antar pihak sangat penting dalam pelaksanaan SDGs hingga penyusunan laporan dan VLR. Pemerintah daerah melalui Sekretariat Daerah SDGs, baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota harus mampu menjadi manajer, fasilitator dan pendamping agar semua pihak bersinergi.

2.2. Tahapan Penyusunan VLR SDGs

VLR sebagai dorongan dari UN/PBB tidak memiliki waktu khusus untuk dilaporkan. VLR SDGs dapat disusun dan dipublikasikan setiap tahun atau beberapa tahun sekali tergantung kebijakan dan sumber daya yang dimiliki tiap daerah. Beberapa pemerintah daerah menyusun VLR SDGs setiap tahun atau dua tahun sekali, yang lain menyusun setiap tiga tahun atau lebih.

VLR SDGs yang disusun berdasar laporan tahunan SDGs daerah dapat dilakukan dan disampaikan secara berkala guna mengukur kemajuan dan tantangan dalam mencapai SDGs. Dengan menyusun VLR SDGs secara berkala, pemerintah daerah dapat mengevaluasi keberhasilan dan kendala dari kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan. Hal ini juga sebagai alat evaluasi pencapaian program dan memperbaiki kekurangan untuk menjadi pembelajaran dalam proses pembangunan di masa mendatang.

Merujuk pada **Buku Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan SDGs** yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas maka laporan VLR SDGs dapat disusun bersamaan atau setelah daerah menyelesaikan Laporan Capaian Tahunan SDGs.

Penyelesaian laporan VLR SDGs dapat mempertimbangkan kesempatan daerah untuk dapat mempublikasikan laporan tersebut sebelum acara HLPF yang diselenggarakan oleh kantor pusat PBB. HLPF dilaksanakan di bulan Juli setiap tahunnya dan bila merujuk pada penyampaian VNR maka paling lambat disampaikan di bulan Juni, dengan demikian, laporan VLR SDGs dapat dikirimkan pada bulan Juni setiap tahunnya.

Berdasarkan pengalaman penyusunan VNR SDGs serta sejalan dengan periode penyusunan laporan tahunan capaian SDGs, tahapan dan jangka waktu penyusunan VLR SDGs adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Tahapan Penyusunan VLR SDGs

1. Tahap Persiapan dan Perencanaan

Tahapan persiapan dan perencanaan diawali dengan pertemuan kick-off sebagai tanda dimulainya proses penyusunan VLR SDGs. Dalam pertemuan ini semua pihak yang akan terlibat diundang oleh koordinator SDGs di daerah (Setda atau Bappeda) guna menyampaikan informasi tentang rencana penyusunan, tahapan pelaksanaan, struktur laporan dan meminta komitmen serta dukungan dari setiap pemangku kepentingan selama proses penyusunan VLR SDGs. **Waktu: Bulan Pertama.**

2. Tahap Pengumpulan dan Analisis Data

Pada tahapan ini dilakukan Rapat seri setiap Tujuan yang akan dianalisis dalam VLR. Jangka waktu rapat seri ditetapkan oleh setiap penanggung jawab Tujuan yang dikoordinasi oleh Ketua Pokja setiap Pilar. Rancangan awal dan hasil analisis setiap Tujuan serta data capaian program, kegiatan, dan praktik baik SDGs yang terkumpul dari pemangku kepentingan pemerintah dan nonpemerintah dikomunikasikan melalui pertemuan konsultasi publik untuk mendapatkan saran dan masukan. **Waktu: Bulan Kedua.**

3. Tahap Konsultasi dan Keterlibatan Para Pihak

Hasil pengumpulan dan analisis data dikonsolidasikan dan dibahas pada rapat agar semua pihak mendapatkan informasi yang menyeluruh atas analisis capaian dan tantangan serta strategi pencapaian dari setiap Tujuan yang dibahas. Pada tahap ini perlu melibatkan sebanyak mungkin pihak yang terlibat baik dari pemerintah daerah dan nonpemerintah. **Waktu: Bulan Ketiga.**

4. Tahap Penyusunan Dokumen VLR

Pada tahapan ini, semua data dan informasi yang telah mendapat masukan dari berbagai pihak dirangkum menjadi dokumen yang utuh. Dalam penyusunan dokumen VLR diharapkan dibentuk tim penyusun yang beranggotakan wakil dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, filantropi dan pelaku usaha dan media. **Waktu: Bulan Keempat.**

Perlu juga menjadi perhatian, bahwa penyelesaian laporan VLR SDGs dapat mempertimbangkan kesempatan daerah untuk dapat mempublikasikan laporan tersebut di kegiatan HLPF yang diselenggarakan oleh kantor pusat PBB, yang biasanya dilaksanakan setiap bulan Juli di setiap tahunnya. Untuk kegiatan ini, laporan VLR SDGs harus dikirimkan pada bulan Juni di setiap tahunnya.

5. Tahap Validasi dan Penyempurnaan

Tahap akhir dari proses penyusunan VLR adalah pembahasan draf final VLR kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SDGs maupun penyusunan VLR di daerah. Tahap ini merupakan tahap pemaparan secara utuh konsep laporan VLR setelah mendapat masukan dari para pihak dan dimaksudkan untuk mendapatkan masukan serta komentar akhir sebelum benar-benar difinalkan dan disampaikan kepada UN. Pada tahap ini, dokumen rancangan final VLR perlu kiranya disampaikan kepada Kementerian PPN/ Bappenas melalui Ketua Tim Pelaksana Nasional SDGs untuk mendapatkan masukan dan tinjauan akhir. **Waktu: Bulan Kelima.**

6. Tahap Diseminasi dan Advokasi

Setelah melalui proses perbaikan dan penyempurnaan, maka laporan VLR SDGs yang telah final dapat dialih bahasakan ke dalam Bahasa Inggris yang selanjutnya dipublikasikan pada tingkat daerah, nasional dan global. **Waktu: Bulan Keenam Minggu ke-1.**

7. Tahap Penyampaian VLR ke UN Agencies

Penyampaian dokumen final VLR dilakukan dengan Penayangan Dokumen VLR SDGs di Laman UN DESA. Dokumen VLR yang telah disampaikan kepada UN-DESA akan ditinjau dan selanjutnya akan diunggah oleh UN DESA pada laman: <https://sdgs.un.org/topics/voluntary-local-reviews> Periode waktu unggahan tergantung proses di dalam UN-DESA. **Waktu: Bulan Keenam Minggu ke-3.**



3

FORMAT DAN STRUKTUR ISI LAPORAN VLR SDGs

**MEMBAHAS FORMAT
STRUKTUR LAPORAN VLR
SDGs.**



3.1. Format dan Sistematika Laporan VLR SDGs

Laporan VLR SDGs dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia dan selanjutnya harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris atau bahasa lain yang diakui oleh PBB. Namun untuk mempermudah pemahaman, VLR SDGs dari Indonesia sebaiknya ditulis dan disampaikan dalam bahasa Inggris. Laporan VLR SDGs ditulis dengan format naratif, menyertakan tabel, grafik, dan gambar informatif serta menampilkan sisi estetis agar lebih menarik.

Laporan VLR SDGs harus mencakup informasi yang valid dan akurat. Berdasarkan pada pengalaman, jumlah halaman laporan VLR SDGs yang telah dibuat oleh daerah dari negara-negara lainnya berkisar antara 15 (lima belas) sampai dengan 200 (dua ratus) halaman.

Sistematika laporan VLR SDGs yang disajikan dalam Bahasa Inggris adalah sebagai berikut :

1. *Opening Statement*
2. *Highlights (main messages)*
3. *Introduction*
4. *Methodology and Process for Preparation of The Review*
5. *Policy and Enabling Environment*
6. *Progress on Goals and Targets*
7. *Means of Implementation*
8. *Conclusion and Next Steps*
9. *Annexes*

Panduan ini menyajikan sistematika dalam Bahasa Inggris untuk menghindari kesalahan dalam penerjemahan. Detail dari isi setiap bagian dalam laporan VLR SDGs di atas dijelaskan sebagai berikut:

Opening Statement

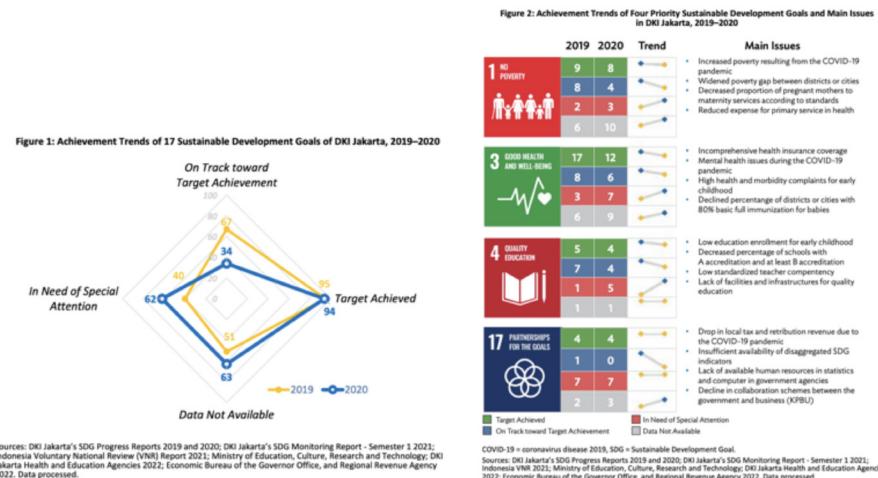
Bagian ini berisi kata sambutan atau pengantar dari Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, atau Bupati) untuk menunjukkan visi dan komitmen daerah terhadap SDGs. Kata pengantar mencerminkan bagaimana SDGs menjadi bagian dari visi daerah dan pengarusutamaan SDGs dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sekilas ringkasan keberhasilan, tantangan utama dalam implementasi SDGs, komitmen menuju tindakan nyata termasuk kebijakan, anggaran, lembaga dan kerangka peraturan pemerintah.

Panjang bagian ini sebaiknya tidak lebih dari 1 (satu) halaman.

Highlight (Main Messages)

Bagian ini dapat memuat beberapa hal sebagai berikut:

1. Pesan utama dan ringkasan pendek dari laporan VLR SDGs, tantangan dan pelajaran yang dapat dipetik. Beberapa praktik baik yang sangat transformatif dapat diangkat secara singkat untuk dibagikan kepada negara, provinsi, kota atau kabupaten lainnya.
2. Upaya yang dilakukan untuk memobilisasi semua pemangku kepentingan di tingkat daerah dalam proses penyusunan VLR SDGs dan implementasi SDGs secara luas yang menunjukkan bagaimana prinsip tidak meninggalkan siapa pun, serta hak asasi manusia, non-diskriminasi, dan kesetaraan gender telah tercermin dalam aksi-aksi SDGs di tingkat daerah.
3. Ringkasan data capaian indikator SDGs sesuai dengan Metadata Indikator SDGs Indonesia serta ketersediaan data tiap Tujuan. Ringkasan ini dapat ditampilkan secara menarik dalam bentuk visualisasi berupa infografis agar mudah dibaca. Informasi ringkasan ketersediaan data ditampilkan dengan grafis yang menarik seperti yang tampil dalam laporan VLR SDGs Provinsi DKI Jakarta.



Gambar 3. Contoh Tampilan Infografis di Laporan VLR Provinsi DKI Jakarta

4. Rencana dan tantangan utama dalam implementasi agar mendapatkan solusi (pembentukan, teknologi, peningkatan kapasitas, data, dll.), termasuk juga area di mana kota atau wilayah tersebut ingin menerima saran dari kota lain atau daerah, atau dukungan dari berbagai aktor seperti pemerintah nasional, rekan kerja, asosiasi pemerintah daerah, CSO, lembaga penelitian, donor, dan pihak lainnya.

Bagian ini sebaiknya disampaikan tidak lebih dari 2 (dua) halaman.

Introduction

Bagian ini dapat memuat beberapa hal sebagai berikut:

1. Penjelasan yang singkat tentang karakteristik lokal provinsi, kota, atau kabupaten serta merefleksikan mengapa penyusunan VLR SDGs perlu dilakukan.
2. Sejarah singkat tentang kota, informasi geografis wilayah mencakup luasan serta potensi sumber daya yang dimiliki.
3. Struktur tata kelola pemerintahan, profil demografis dan informasi pertumbuhan ekonomi dari daerah.
4. Penjelasan singkat tentang bagaimana perjalanan pemerintah daerah menuju keberlanjutan dan menunjukkan kekuatan dan kelemahan utama yang dimiliki oleh daerah, termasuk sorotan kemajuan (*highlight*) yang telah dicapai dalam pencapaian SDGs pada Tujuan-Tujuan tertentu, sesuai prioritas pembangunan daerah yang menjadi fokus, serta menunjukkan bagaimana upaya daerah telah berkontribusi pada pencapaian Tujuan dan Target SDGs di tingkat nasional.
5. Strategi dan kerangka kerja utama, serta mekanisme kelembagaan, yang digunakan dalam implementasi SDGs secara lokal serta mencerminkan pengaruh provinsi, kota, atau kabupaten dalam konteks SDGs secara nasional.
6. Penjelasan bagaimana provinsi, kabupaten atau kota dapat memobilisasi para pemangku kepentingan pemerintah dan nonpemerintah di tingkat daerah, termasuk kemitraan dan koordinasi dengan mitra pembangunan luar negeri bila ada.

Bagian ini sebaiknya disampaikan tidak lebih dari 4 (empat) halaman.

Secara umum bagian ini menjelaskan tentang metodologi penyusunan VLR SDGs

Methodology and Process for Preparation of The Review

mencakup:

1. Penjelasan metodologi lengkap yang digunakan untuk penyusunan VLR SDGs dengan merefleksikan entitas yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan proses (kantor Gubernur, Walikota atau bupati, kelompok kerja, sekretariat SDGs, dll.), bagaimana tanggung jawab ini diberikan, dan langkah apa yang diambil untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses tersebut.
2. Penjelasan tentang proses pengambilan keputusan terhadap Tujuan pada SDGs yang diprioritaskan untuk diangkat dalam laporan VLR SDGs dan rencana bagaimana area atau Tujuan lainnya yang tidak diprioritaskan akan ditangani di masa mendatang.
3. Penjelasan langkah-langkah atau tahapan yang diambil untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah, termasuk dalam proses penentuan ruang lingkup dan perancangan laporan VLR SDGs, dan

- menunjukkan langkah-langkah inovatif apa yang digunakan untuk memastikan proses inklusif yang dilakukan. Pihak-pihak yang berpartisipasi dapat juga disampaikan dalam bagian ini atau sebagai lampiran terpisah dalam laporan VLR SDGs. Jika ada gambar/bagan alur kerja dalam penyusunan VLR SDGs dapat disematkan di dalam bagian ini.
4. Penjelasan bagaimana pihak-pihak yang berpartisipasi dapat terlibat, serta mencatat tantangan yang dihadapi dan cara untuk meningkatkan proses inklusif tersebut di masa mendatang.
 5. Penjelasan bagaimana data dikumpulkan dari berbagai pemangku kepentingan, seperti BPS dan OPD dan pemangku kepentingan nonpemerintah, dan apa saja tantangan, kesenjangan, dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan SDGs dan penyusunan VLR SDGs. Isu terkait akses informasi dan data serta transparansi juga dapat dibahas di bagian ini.
 6. Pembelajaran yang dipetik dari proses penyusunan VLR SDGs dan rekomendasi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas elemen VLR SDGs di masa mendatang.

Bagian ini sebaiknya disampaikan tidak lebih dari 2 (dua) halaman.

Bagian ini memuat informasi tentang kebijakan dan berbagai sarana pendukung,

Policy and Enabling Environment

yang dapat berisi beberapa komponen sebagai berikut:

1. Keterkaitan dengan Kebijakan Nasional dalam Implementasi SDGs. Bagian ini dapat berisikan informasi bagaimana daerah merujuk dan menurunkan kebijakan nasional untuk implementasi SDGs di tingkat daerah.
2. Upaya Menciptakan Kepemilikan SDGs dan VLR SDGs di Tingkat Daerah. Penjelasan tentang berbagai upaya pemerintah daerah dan pemangku kepentingan nonpemerintah dalam meningkatkan pengetahuan SDGs kepada semua pemangku kepentingan dan membangun kepemilikan SDGs, untuk bersama-sama berkolaborasi mendukung pembangunan dan pencapaian SDGs di tingkat daerah.
3. Integrasi SDGs dalam Kerangka Kerja Daerah. Berisi penjelasan tentang bagaimana pemerintah daerah melokalkan SDGs dan mengintegrasikan dengan rencana pembangunan daerah jangka pendek dan menengah mereka.
4. Leaving No One Behind (Tidak Meninggalkan Siapapun). Menjelaskan upaya daerah dalam melibatkan semua pihak termasuk masyarakat secara inklusif dalam mendukung program pembangunan dan upaya percepatan pencapaian SDGs.
5. Sarana pendukung dan lingkungan pendukung. Menjelaskan tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan untuk pencapaian SDGs antara lain peningkatan

- kapasitas yang telah dilakukan, teknologi yang diterapkan, pendanaan yang dikomitmenkan, status ketersediaan data yang ada, mekanisme pemantauan dan evaluasi yang dipergunakan.
6. Mekanisme Kelembagaan. Penjelasan bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola SDGs dengan mekanisme institusionalisasi atau kelembagaan seperti pembentukan sekretariat SDGs tingkat provinsi, kabupaten atau kota, peningkatan kapasitas sekretariat dan aktor pembangunan, kemitraan dengan berbagai pihak (termasuk dengan mitra pembangunan internasional) untuk mendukung pelaksanaan dan tata kelola SDGs.
 7. Sinergi dengan pihak Lain. Penjelasan tentang koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan daerah dan pihak lain, misalnya antara Provinsi dengan Kabupaten dan Kota dalam sinergi pelaksanaan SDGs (pengumpulan data, kemitraan multi-pihak)

Dalam bagian ini dapat pula ditambahkan box berisi cerita nyata tentang institusionalisasi SDGs di tingkat kabupaten/kota, atau pengalaman melakukan sinergi dengan wilayah lain, secara singkat dalam 3-2 kalimat.

Secara keseluruhan bagian ini sebaiknya disampaikan tidak lebih dari 4 (empat) halaman.

Bagian ini mengulas tentang analisis capaian dari setiap Tujuan yang dilaporkan,

Progress on Goals and Targets

yang mencakup:

1. **Pengantar** yang menjelaskan sekilas tentang Tujuan dari SDGs yang dilaporkan serta cakupan indikatornya.
2. **Status Capaian** yang berisikan poin-poin penting dari capaian SDGs dan beberapa bagian pendukung berupa:
 - A. Tinjauan status capaian SDGs yang berisikan data statistik dasar (baseline), target dan capaian indikator SDGs khususnya yang mengalami kemajuan dengan dilengkapi visualisasi tren berupa bagan atau grafik beserta penjelasan/narasinya.
 - B. Pencapaian indikator SDGs yang masih memerlukan perhatian khusus, dilengkapi dengan visualisasi tren berupa infografik beserta penjelasan/narasinya.
 - C. Tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian SDGs.
 - D. Kebijakan dan strategi yang direncanakan untuk perbaikan ke depan berdasar dari tantangan dan pembelajaran yang dihadapi.
 - E. Inovasi dan praktik baik yang dapat ditampilkan dalam bentuk box

dilengkapi dengan foto dokumentasi serta testimoni penerima manfaat (jika ada). Format penulisan praktik baik SDGs dapat merujuk pada **Buku Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan SDGs yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas**

- F. Bagian ini juga dapat memuat kemitraan multi-pihak yang dilakukan oleh pemerintah dan nonpemerintah, dalam upaya sinergi antar aktor dalam kolaborasi pencapaian target SDGs di tingkat daerah.
- 3. Upaya Percepatan Pencapaian SDGs** menjelaskan rencana tindak lanjut, rencana aksi, penyelesaian masalah dan tantangan di masa depan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja capaian SDGs di tingkat daerah.

Panjang halaman untuk bagian ini dapat menyesuaikan dengan banyaknya informasi yang akan disampaikan.

Bagian ini memuat beberapa hal sebagai berikut:

Means of Implementation

1. Kemampuan pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya lokal, pemanfaatan yang efektif dan kebutuhan tambahan sumber daya untuk keberhasilan pelaksanaan SDGs seperti pembiayaan, teknologi dan data (untuk mendukung pemantauan, evaluasi dan pelaporan SDGs), peningkatan kapasitas sekretariat SDGs, serta kemitraan multi-pihak.
2. Hasil analisis atas pelaksanaan SDGs yang menunjukkan bagaimana sistem pembiayaan, data statistik, dan alokasi sumber daya diselaraskan untuk mendukung ketercapaian Agenda 2030 dengan memastikan tidak ada satupun yang tertinggal.
3. Menampilkan hasil analisis hambatan dalam mengakses dan memanfaatkan sumber-sumber baru maupun tambahan.
4. Hasil identifikasi kebutuhan khusus yang mungkin diperlukan sehubungan dengan sarana pelaksanaan, macam-macam kemitraan dan kolaborasi apa yang dibutuhkan.
5. Pengalaman dan tindakan atas hasil kerja sama dan yang menunjukkan praktik baik yang berdampak. Pengalaman dan contoh tindakan dapat dimasukkan ke dalam box dengan dilengkapi foto.

Bagian ini sebaiknya disampaikan tidak lebih dari 2 (dua) halaman.

Conclusion and Next Steps

Bagian ini dapat memuat beberapa hal sebagai berikut:

1. Rangkuman kebijakan dan strategi utama atas Tujuan dari SDGs yang dianalisis.
2. Langkah-langkah apa yang direncanakan untuk mengakselerasi pencapaian SDGs dan mengatasi tantangan.
3. Pelajaran utama yang didapatkan oleh provinsi atau kabupaten/kota dari proses pelaksanaan SDGs dan penyusunan VLR.
4. Komitmen pemerintah daerah dan ajakan untuk melanjutkan keterlibatan para pihak termasuk kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya baik dalam pelaksanaan SDGs di daerah maupun menindaklanjuti rekomendasi kebijakan yang disepakati dalam laporan VLR.
5. Pernyataan bagaimana provinsi atau kabupaten/kota berencana untuk melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan SDGs dan rencana proses penyusunan VLR SDGs selanjutnya (bila ada).

Bagian ini sebaiknya disampaikan tidak lebih dari 2 (dua) halaman.

Bagian ini berupa lampiran laporan yang dapat memuat data statistik lengkap

Annexes

dan bila dimungkinkan terdisagregasi hingga tingkat paling rendah atas Tujuan, Target dan Indikator SDGs yang dipilih untuk dianalisis dalam VLR SDGs. Lampiran statistik juga dapat memuat semua capaian indikator dari semua Tujuan yang tidak dianalisis lengkap di dalam badan narasi VLR. Lampiran juga dapat memuat kumpulan praktik baik dari para pihak yang tidak dapat tercantum pada badan narasi laporan.

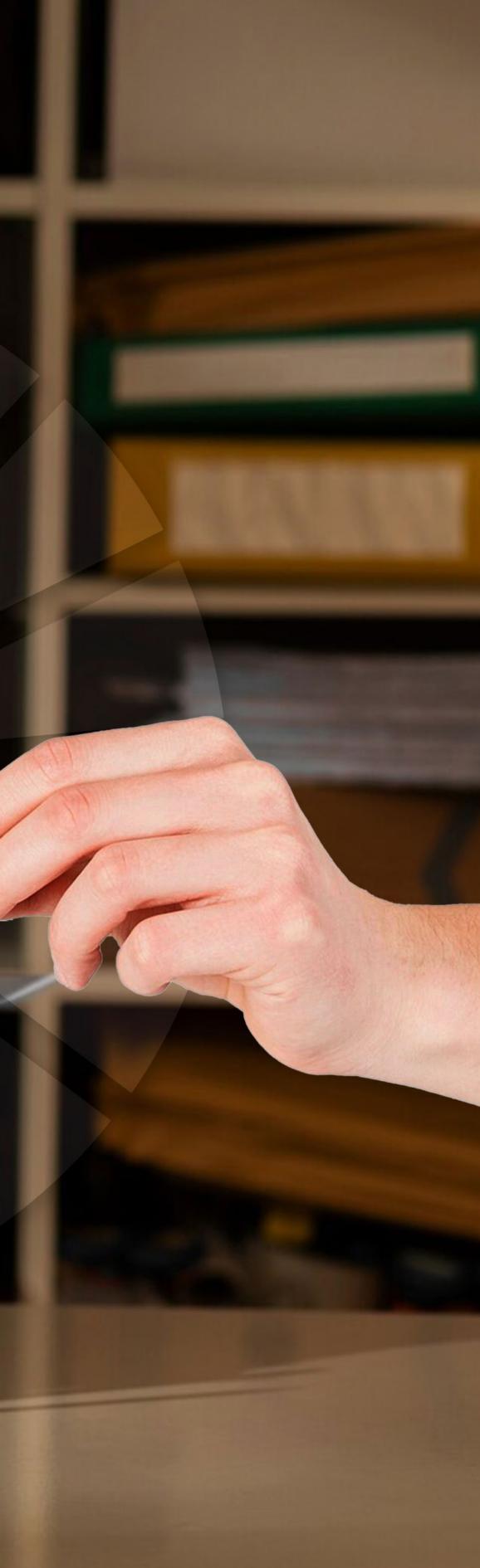
Keterpilahan (disagregasi) data yang ditampilkan merujuk pada **Buku Metadata Indikator SDGs** yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas.



4

DISEMINASI LAPORAN DAN TINDAK LANJUT VLR SDGs

MEMBAHAS LANGKAH
 PENYEBARLAPORAN,
 ADVOKASI DAN KOMUNIKASI
 VLR SDGs.



4.1. Diseminasi Laporan VLR SDGs

Setelah laporan VLR SDGs disusun, upaya selanjutnya adalah mengirimkan dan menyebarluaskan laporan tersebut ke para pihak. Berikut adalah upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam penyebaran laporan VLR SDGs:

1. Website Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN-DESA) di alamat web: <https://sdgs.un.org/topics/voluntary-local-reviews> . Laporan VLR SDGs yang telah disusun dalam Bahasa Inggris oleh pemerintah daerah dapat dikirimkan dalam format dokumen PDF ke alamat email: dsdg@un.org dengan Subjek: *Voluntary Local Review from [Tambahkan nama kota/daerah/ provinsi dan negara]*. Dengan tembusan email kepada Kementerian PPN/Bappenas melalui email: sekretariat.sdgs@bappenas.go.id dan kepada Kementerian Dalam Negeri di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Laporan disampaikan oleh pejabat pemerintah daerah yang ditunjuk.
2. Kementerian PPN/Bappenas. Dokumen laporan VLR SDGs yang telah disusun (dalam format PDF) dikirimkan dengan surat resmi oleh pemerintah daerah ke alamat email: sekretariat.sdgs@bappenas.go.id
3. Kementerian Dalam Negeri. Dokumen laporan VLR SDGs yang telah disusun (dalam format PDF) dikirimkan dengan surat resmi oleh pemerintah daerah ke Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
4. Website Resmi Pemerintah Daerah. laporan VLR SDGs dapat dipublikasikan melalui laman atau website resmi pemerintah daerah termasuk laman Bappeda, agar masyarakat serta berbagai pihak dapat mengakses.

Selain itu, VLR SDGs juga dapat dipublikasikan pada:

1. Website Online VLR Lab, platform online untuk berbagi VLR SDGs yang dikembangkan oleh IGES (*Institute for Global Environmental Strategies*), yang dapat diakses melalui <https://www.iges.or.jp/en/projects/vlr> . Laporan VLR SDGs yang telah dikembangkan dapat dikirimkan melalui formulir online ini: <https://www.iges.or.jp/en/projects/vlr/form>

4.2. Tindak Lanjut VLR SDGs

Sebagai upaya penyebaran praktik baik/pembelajaran dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan VLR SDGs untuk menginspirasi dan mengajak daerah-daerah lainnya saling berbagi pengetahuan dan praktik baik dalam pelaksanaan SDGs atau dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan VLR SDGs, berikut beberapa kegiatan advokasi dan komunikasi yang dapat diselenggarakan:

1. Menyelenggarakan kegiatan Forum SDGs di tingkat daerah untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang kemajuan pelaksanaan SDGs,

- sosialisasi laporan VLR SDGs, dan praktik baik pelaksanaan SDGs yang telah dilakukan oleh pemangku kepentingan pemerintah dan nonpemerintah di tingkat daerah. Kegiatan ini dapat mengundang dan melibatkan media lokal, baik media *online* maupun *offline*;
2. Berpartisipasi dalam forum pengetahuan dan tinjauan sejawat dengan kota dan wilayah lain, di dalam jaringan kota atau secara bilateral (dengan provinsi, kota atau kabupaten dari negara lainnya), seperti APPSI, APEKSI, APKASI.
 3. Berpartisipasi dalam berbagai forum pembangunan berkelanjutan dalam skala regional dan internasional yang diselenggarakan oleh PBB, organisasi internasional dan oleh negara-negara anggota PBB;
 4. Menjadikan VLR SDGs sebagai rujukan dalam mengkasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RAD SDGs di tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

European Comission. (2022). European Handbook for SDGs Voluntary Local Reviews. 2022 Edition.

IGES. (2022). State of Voluntary Local Reviews 2022.

Kementerian PPN/Bappenas. (2020). Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Edisi II.

Kementerian PPN/Bappenas. Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Edisi II.

Kementerian PPN/Bappenas. (2019). Panduan Kemitraan Multipihak untuk Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan UCLG-ASPAC. (2022). DKI Jakarta Province Voluntary Local Review 2021. Jakarta Collaboration in Handling the COVID-19 Pandemic : Raise Toward a Resilient Jakarta.

Pemerintah Kota Surabaya dan UCLG-ASPAC. (2021). Voluntary Local Review of Surabaya City 2021. Improving Sustainable Development Towards A-Resilient Post Pandemic Community

UCLG and UN-HABITAT. (2020). Guidelines for Voluntary Local Review : Volume I. A Comparative Analysis of Existing VLRs.

UCLG and UN-HABITAT. (2021). Guidelines for Voluntary Local Review : Volume II. Towards A New Generation of VLR : Exploring the local-national link.

UN-ESCAP. (2020). Asia-Pacific Regional Guidelines on Voluntary Local Reviews. Reviewing Local Progress to Accelerate Action for the Sustainable Development Goals.

United Nations. (2018). Voluntary Local Reviews: A Tool for Localizing and Implementing the Sustainable Development Goals.

United Nations. Department of Economic and Social Affairs. (-). Global Guiding Elements for Voluntary Local Reviews (VLRs) of SDGs Implementation.



Pedoman Teknis
Penyusunan Voluntary Local Review (VLR) SDGs
Untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia



Kementerian PPN/
Bappenas



implemented by:
giz
Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH